

TESIS

**PELAKSANAAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS YANG
DIKUTI DENGAN LIKUIDASI OLEH LIKUIDATOR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**

*Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan*



Disusun Oleh :

YANA IKHRAMI

1420122025

Pembimbing 1

Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA

Pembimbing 2

Dr. Beatrix Benni, SH., M.Pd., M.Kn

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

**PELAKSANAAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS YANG
DIIKUTI DENGAN LIKUIDASI OLEH LIKUIDATOR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007**

ABSTRAK

**(Yana Ikhrami, 1420122025, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 115 halaman, Padang, 2017)**

Likuidasi merupakan suatu proses pemberesan harta kekayaan Perseroan Terbatas. Pemberesan harta kekayaan ini dilakukan oleh likuidator yang dapat diangkat secara khusus. Aturan mengenai pembubaran sebuah Perseroan Terbatas harus diikuti dengan likuidasi diatur dalam Pasal 142 UUPT, akan tetapi UUPT belum mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme pembubaran Perseroan Terbatas tersebut, hal ini terlihat dari contoh kasus yang diambil yaitu PT. Agam Karya Prima dan PT. Rahman Tamin dalam likuidasi. Rumusan masalahnya yaitu: 1) Bagaimana hubungan hukum antara likuidator dengan pihak ketiga? 2) Bagaimana hak dan kewajiban pemegang saham dan likuidator dalam pembubaran perseroan dengan likuidasi? 3) Bagaimana tugas dan pertanggungjawaban likuidator dalam melakukan likuidasi perseroan? Berdasarkan rumusan masalah di atas, metode yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1) Dalam melaksanakan tugasnya peran likuidator terbit dari suatu hubungan hukum antara likuidator dengan pihak lain atau khususnya organ Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan perikatan atau hubungan hukum lahir karena persetujuan / karena undang-undang. 2) Pelaksanaan pembubaran Perseroan Terbatas dengan likuidasi melahirkan hak dan kewajiban bagi pemegang saham dan likuidator. Likuidator berhak mewakili pembubaran Perseroan Terbatas yang diikuti dengan likuidasi atas pemberesan seluruh aset Perseroan Terbatas. Kewajiban likuidator dalam rangka melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan Terbatas dalam likuidasi terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) UUPT. 3) Likuidator wajib melakukan pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan, mengumumkan dalam Surat Kabar dan BNRI serta melakukan pembayaran kepada kreditor dan membagikan sisa hasil likuidasi kepada pemegang saham. Setelah semua tugas likuidator selesai dilakukan maka likuidator harus memberikan laporan kepada RUPS atau Pengadilan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan likuidasi Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas akan kehilangan status badan hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban diterima oleh RUPS atau Pengadilan.

Kata Kunci: Perseroan, Likuidasi, Likuidator.

**THE IMPLEMENTATION OF EXTERMINATION OF LAW-BASED
COMPANY FOLLOWED BY LIQUIDATION CONDUCTED BY
LIQUIDATOR BASED ON LAWS NO 40 IN 2007**

ABSTRACT

**(Yana Ikhrami, 1420122025, Master of Notary, Law Faculty Andalas University,
115 pages, Padang, 2017)**

Liquidation is a process of property releasing of limited liability company. The releasing of this property is done by liquidator. The regulation of extermination of limited liability company must be followed with liquidation regulated in Article 142 limited liability companies act. But limited liability companies act has not regulated explicitly about the mechanism of limited liability company extermination. This case is seen from the cases taken, they are PT. Agam Karya Prima dan PT. Rahman Tamin in liquidation. The formulation of problem are: 1) How is the law relationship between liquidator and the third party? 2) How are the right and obligation of shareholders and liquidator in exterminating of law-based company with liquidation? 3) How are the duties and responsibilities of liquidator in conducting liquidation of law-based company? Based on the formulations of problem above, the used method is normative approach. The result of this research show a that: 1) In carrying out the duties, the role of liquidator appears from law relationship between liquidator and other party or especially the organ of limited liability company. Based on article 1233 criminal code of civil law, it states that alliance or law relationship emerges because of approval/ because of law. 2) The implementation of extermination of law-based company with liquidation brings out right and obligation to shareholders and liquidator. Liquidator has a right to represent the extermination of limited liability company followed by liquidation toward the releasing of all assets of that limited liability company. The obligation of liquidator in doing the releasing of all properties of limited liability company in liquidation is in article 149 section (1) limited liability companies act. 3) Liquidator is obligated to do recording and collecting of the property of law-based firm, to announce in newspaper and State Gazette of the Republik of Indonesia, to do payment to creditor as well as to share liquidation dividend to shareholders. After all duties of liquidators finish being done, therefore liquidator must give report to General Meeting of Shareholders or trial as accountability toward the implementation of liquidation of limited liability company. Limited liability company will lose the status of legal entity until the finishing of liquidation and accountability accepted by General Meeting of Shareholders or trial.

Keywords : Law-based company, Liquidation, Liquidator.